

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk daerah yang melakukan pemantauan dan perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH adalah indeks yang mencatat pertumbuhan positif/negatif serta menganalisis komoditas penyumbang andil fluktuasi pada waktu dan kondisi tertentu secara berkala. Meskipun Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk daerah Non-IHK, namun Pemerintah Daerah tetap melaksanakan kewajiban dalam pelaksanaan tugas TPID yang tertuang dalam peraturan perundangan berlaku.

Mengacu pada program dan panduan pusat tentang Pengendalian Inflasi, setiap Pemerintah Daerah wajib berfokus pada sisi penguatan data dan realibilitas program, berfokus kepada program yang sinergis dengan Visi dan 8 Misi “Asta Cita” serta bersinkronisasi dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Anambas 2025-2030 khususnya pada program Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan serta Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata.

Sasaran Fluktuasi Bapok Kabupaten Kepulauan Anamabs Tahun 2025, 2026, dan 2027 adalah  $1,5 \pm 0,5\%$ . Mengacu pada Tema Peta Jalan Nasional “Akselerasi Perbaikan Struktural dengan Mendorong Adopsi Digital untuk Stabilisasi Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Baru”, serta Berfokus pada 4 Kunci Stretegis (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)

Perhitungan IPH Kabupaten Kepulauan Anambas atas 17 komoditas pangan bahan pokok dan penting (Bapokting) Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan beberapa pendekatan perhitungan pertumbuhan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pertumbuhan dalam periode tertentu serta periodikal. Pendekatan perhitungan ini juga bertujuan untuk memudahkan dalam pencatatan dan pelaporan pelaksanaan tugas yang lebih optimal. Perhitungan pertumbuhan IPH yang digunakan di Anambas yaitu perhitungan secara *month to month (m-t-m)*, *year to date (y-t-d)*, dan *year on year (y-o-y)*.

Berikut ini merupakan daftar 17 Bahan Pangan yang menjadi sasaran pantau dan fluktuatif untuk pergerakan IPH di Kepulauan Anambas, diantaranya :

(Sumber data: <http://inbok.disperindag.kepriprov.go.id/>)

Beras Medium	Daging Ayam Broiler
Beras Premium	Telur Ayam Broiler
Gula Pasir	Cabe Merah Keriting
Minyak Kita	Cabe Rawit
Minyak Goreng Curah	Bawang Merah Jawa
Minyak Kemasan Sederhana	Bawang Putih

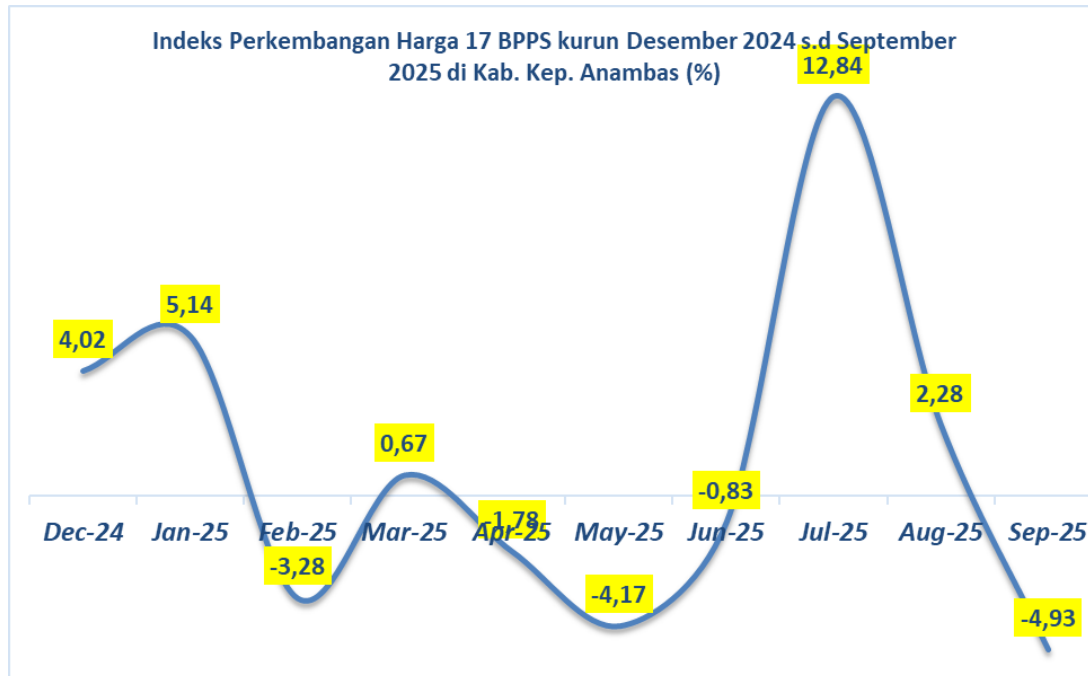
Tepung

Kedelai

Daging Sapi Murni

Jagung

Daging Sapi Impor (Beku)



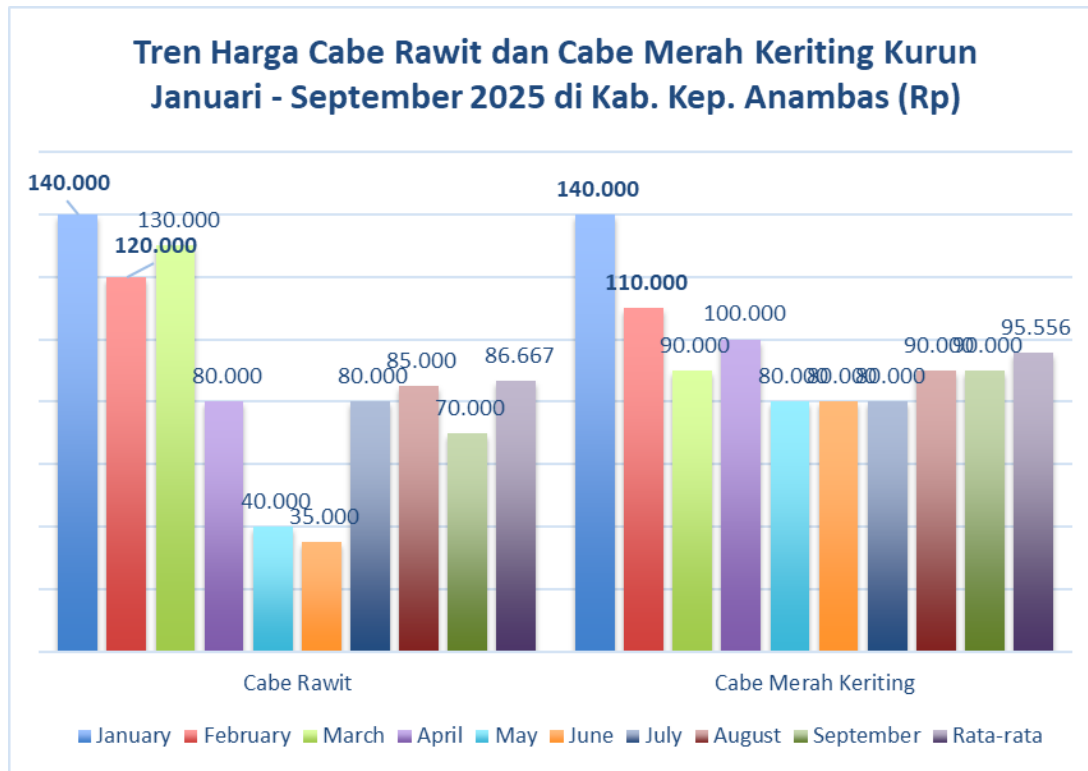
**Grafik 1. IPH 17 Bahan Pokok Strategis (BPPS) Kurun Desember 2024 s.d 31 September 2025 di Kab. Kep. Anambas (%)**

Kenaikan IPH diawal tahun 2025 disebabkan karena menurunnya aktivitas moda transportasi laut akibat adanya fenomena musim utara, sehingga sejumlah transportasi pengangkut logistic tidak dapat melakukan proses distribusi. Tren negative IPH mulai terjadi pada bulan Februari hingga Juni 2025, hal ini disebabkan karena melemahnya daya beli masyarakat. Lonjakan IPH kembali naik sebesar 12,84%, Berikut komoditas penyumbang andil fluktuasi di triwulan III Tahun 2025:

Fluktuasi *mtm* Juli sebesar (-1,78%), dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas :

1. Cabe Rawit (128,57%), atau naik dari 35.000/kg ke 80.000/kg;
2. Jagung (66,67%) atau naik dari 12.000/kg ke 20.000/kg;
3. Beras Medium (15,38%) atau naik dari 13.000/kg ke 15.000/kg;
4. Bawang Merah Jawa (-11,11%), atau naik dari 45.000/kg ke 50.000/kg;
5. Bawang Putih (7,14%), atau naik dari 42.000/kg ke 45.000/kg;
6. Daging Ayam Broiler (-4,76%), atau turun dari 42.000/kg ke 40.000/kg;
7. Kedelai (-5,88%), atau turun dari 17.000/kg ke 16.000/kg.

disebabkan karena melemahnya daya beli masyarakat. Lonjakan IPH kembali naik sebesar 12,84% terjadi pada Bulan Juli disebabkan adanya kenaikan 5 komoditas (Grafik. 5).



**Grafik 2. Tren Harga Cabe Rawit dan Cabe Merah Keriting Januari-September Tahun 2025 di Kab. Kep. Anambas**

Komoditas Cabe Rawit dan Cabe Merah Keriting merupakan komoditas paling rentan serta merupakan komoditas yang paling mempengaruhi Indeks Perkembangan Harga di Kepulauan Anambas. Harga Cabe Rawit dan Cabe Merah tertinggi terjadi pada Januari 2025 sebesar masing-masing berada pada harga 140.000/kg, sedangkan Harga Cabe Rawit terendah tercatat pada Juni 2025 sebesar 35.000/kg. Harga terendah Cabe Merah Keriting terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli berada pada harga 80.000/kg. Rata-rata harga Cabe Rawit kurun Januari - September 2025 sebesar 86.667/kg, dan Cabe Merah Keriting Rp. 95.556/kg

Pada Triwulan III Tahun 2025, fluktuasi tertinggi terjadi di Bulan Juli yakni sebesar 12,84%, Agustus 2,28% dan September mengalami fluktuasi negatif sebesar -4,93%, sehingga rata-rata IPH Triwulan III 2025 adalah sebesar 3,40%.

Fluktuasi *mtm* Agustus sebesar (2,28%), dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas:

1. Cabe Merah Jawa (20,00%), atau naik dari 50.000/kg ke 60.000/kg;
2. Cabe Merah Keriting (12,50%), atau naik dari 80.000/kg ke 90.000/kg;
3. Cabe Rawit (6,25%), atau naik dari 80.000/kg ke 85.000/kg;

Sedangkan Fluktuasi *mtm* September sebesar (-4,93%), dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas :

1. Kedelai (6,25%), atau naik dari 16.000/kg ke 17.000/kg.
2. Minyak Kemasan Sederhana (-5,00%), atau turun dari 20.000/kg ke 19.000/kg
3. Gula Pasir (-5,56%), atau turun dari 18.000/kg ke 17.000/kg
4. Daging Sapi Beku Impor (-7,69%) atau turun dari 130.000/kg ke 120.000/kg;
5. Beras Medium (-13,33%) atau turun dari 15.000/kg ke 13.000/kg;
6. Beras Premium (15,79%) atau turun dari 19.000/kg ke 16.000/kg;

- Cabe Rawit (-17,65%) atau turun dari 85.000/kg ke 70.000/kg;  
8. Bawang Merah Jawa (25,00%), atau turun dari 60.000/kg ke 45.000/kg.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

**1. Letak Geografis**

Kepulauan Anambas merupakan daerah kepulauan dengan cakupan  $\pm 98\%$  terdiri dari perairan dan hanya  $\pm 2\%$  daratan, terdiri dari 255 pulau yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan data moda transportasi laut yang berlayar di perairan Anambas dari Instansi Syahbandar Tarempa tahun lalu, Kepulauan Anambas masih melakukan distribusi logistik dari daerah/kota luar ( $\pm 90\%$  dari kabupaten/kota terdekat).

Anambas bukan merupakan daerah surplus bahan pokok dan barang penting, khususnya pada komoditas kebutuhan-kebutuhan pokok (sembako). Pada sektor ketahanan pangan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan masih menemukan kendala aktual di lapangan, minat masyarakat Anambas akan bertani dan bercocok tanam dinilai sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari perspektif sosial budaya yang ditunjukkan dengan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Anambas bermukim dan tinggal di daerah pesisir dan sebagian besar masyarakat Anambas bermata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi cuaca ekstrim juga memberikan dampak negatif terhadap hasil produksi pertanian lokal.

**2. Sarana Prasarana**

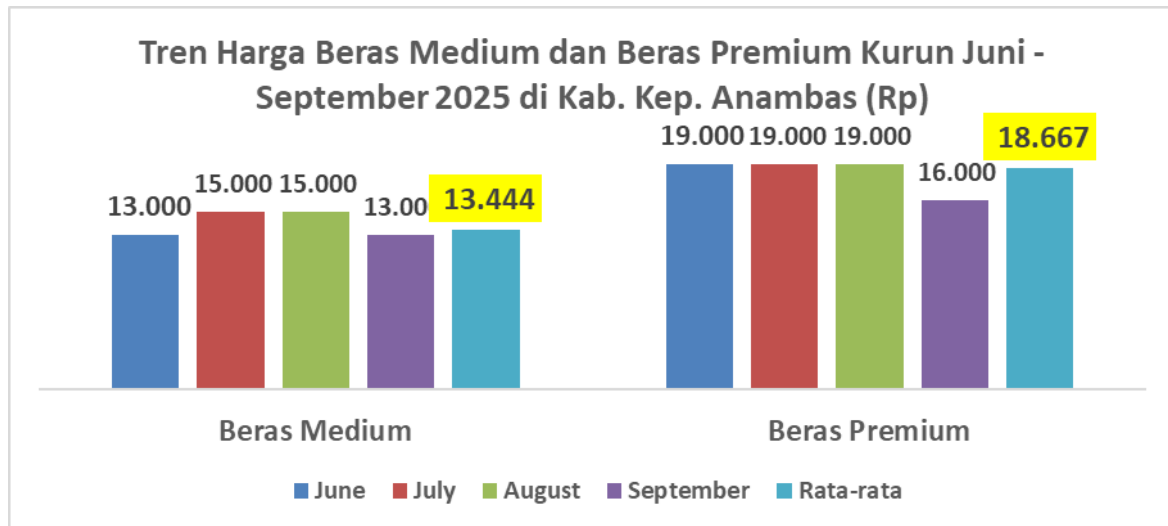
Sarana dan Prasarana penunjang distribusi masih tergolong belum memadai, hal ini disebabkan karena sistem bongkar muat barang (*dwellling time*) terbesar di Pusat Kota Tarempa masih belum terurai dengan baik. Pada Kondisi-kondisi tertentu seperti cuaca buruk, masalah teknis dan keterlambatan kapal dapat berpotensi memberikan efek domino pada aktifitas bongkar muat di pelabuhan. Waktu tunggu aktifitas bongkar muat rata-rata memakan waktu mencapai 14 hari kalender. Penyebab utama lamanya waktu bongkar muat ini disebabkan karena:

- a) Keterbatasan Tenaga kerja Bongkar Muat;
- b) Di Lokasi Pelabuhan Tarempa masih belum memiliki sarana pergudangan;
- c) Jalur Distribusi dalam kota yang sangat sempit dan memakan waktu lama untuk bongkar muat dengan volume sekitar  $1m^3$  (menggunakan moda transportasi kendaraan Roda 3);
- d) Belum dimanfaatkannya Gudang logistik sebagai sarana untuk memperlancar distribusi; dan
- e) Belum selesainya Pembangunan Pelabuhan Gudang Logistik Teluk Ret.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan III Tahun 2025, tercatat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali Gerakan Pangan Murah (GPM). Tercatat 6 (enam) kali oleh Dinas Koperasi usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dan 1 (satu) kali dari Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan.

1. GPM 24 Juli 2025 (DKUMPP)
2. GPM 06 Agustus 2025 (DKUMPP)
3. GPM 14 Agustus 2025 (DKUMPP)
4. GPM 22 Agustus 2025 (DKUMPP)
5. GPM 28 Agustus 2025 (DKUMPP)
6. GPM Serentak Se-Indonesia 30 Agustus 2025 (DPPP); dan
7. GPM 08 September 2025 (DKUMPP)
- 7.



**Grafik 3. Tren Harga Beras Medium dan Beras Premium Juni - September Tahun 2025 di Kab. Kep. Anambas**

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Mendorong jumlah pertumbuhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
2. Peningkatan Infrastruktur dan Tata Kelola Kepelabuhan Milik Pemda;
3. Penetapan Tarif Penyimpanan Barang di Area Terbuka (Non-SRG);
4. Mempercepat Operasional Gudang Logistik;
5. Melaksanakan arahan Pusat melalui rakorda/rakorpusta dalam rangka penanganan inflasi daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melakukan Pendataan Stok dan Harga secara komprehensif;
2. Meningkatkan Kualitas pelaporan pelaksanaan tugas TPID;
3. Mendorong terbentuknya Mitra RPK melalui BULOG;
4. Mendorong percepatan Pembangunan infrastruktur kepelabuhan di Teluk Ret melalui kajian yang komprehensif agar operasional Gudang Logistik dapat Terealisasi pada Tahun 2026;
5. Meningkatkan intensitas Rapat Koordinasi yang seimbang agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat guna dan tepat biaya.

**1. Keterjangkauan Harga dan Ketersediaan Stok**

TPID tetap berupaya melakukan analisa terhadap adanya potensi tekanan harga dan stok barang melalui aktivitas pemantauan harga dan stok barang beredar serta memastikan ketersediaan barang dan tidak terjadinya kelangkaan komoditas di Kepulauan Anambas.

**2. Ketersediaan Pasokan/Produk**

TPID secara konsisten tetap mendorong dan mengawal program-program non-moneter seperti menaikkan hasil produksi komoditas pangan lokal di daerah agar dapat mencukupi

kuota kebutuhan lokal dan melakukan pengawasan harga dan distribusi barang beredar secara berkelanjutan.

### 3. Kelancaran Distribusi

TPID secara berkesinambungan tetap mengawal program **“Peningkatan Sistem Logistik secara Terintegrasi pengalihan lokus Pelabuhan ke Area Logistik Teluk Ret”**. Pengalihan dilakukan secara parsial dengan penggunaan logistik dan pemanfaatan sisi Pelabuhan Teluk Ret untuk transportasi antar pulau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat memaksimalkan perannya dalam memberikan pembinaan yang lebih intensif dengan penyertaan modal dana desa, pendampingan pelatihan pengelolaan keuangan yang berbasis aplikasi serta mendorong perencanaan bantuan stimulus fiskal untuk BUMDES yang dinilai berhasil dan layak dalam operasional BUMDES.

### 4. Komunikasi Efektif

TPID melaksanakan fungsi koordinatif melalui Bagian Perekonomian SDA dan Inpektorat Daerah untuk mendapatkan seluruh data dukung dan informasi kegiatan/program yang berkaitan dengan TPID. Seluruh data dan informasi agar dapat dituangkan dalam suatu Laporan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan arahan Kemendagri tentang Tim Penanganan Inflasi Daerah.